



# Buletin Parlementaria

Nomor 1070/III/IX/2019 • September 2019



## DPR Butuh Kritik Membangun



9 772614 339005



6 Seleksi Capim KPK  
Sangat Terbuka



23 DPR Raih Predikat  
WTP 2014-2018

# DPR Butuh Kritik Membangun



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membuka final *Stand Up Comedy* "Kritik DPR". Foto: Jaka/HR

**K**etua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, saat ini DPR RI sudah menjadi parlemen terbuka. Siapa pun bisa menyampaikan kritik kepada para wakil rakyat tanpa merasa takut, sebaliknya DPR RI juga membutuhkan kritik membangun untuk peningkatan kinerja dewan. Hal ini membuktikan kesungguhan DPR RI sebagai rumah rakyat sesungguhnya dan lembaga yang terbuka terhadap rakyatnya untuk menyampaikan berbagai aspirasi.

"Kami di DPR tidak anti kritik atau menutup diri. Kritik membangun yang kita butuhkan, karena itu silahkan kritik dan kami akan *kasih* hadiah," papar Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu saat membuka final lomba *Stand Up Comedy* 'Kritik DPR' di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9). Turut hadir Wakil Ketua

DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, serta Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing.

Lomba *Stand Up Comedy* 'Kritik DPR' ini merupakan rangkaian HUT ke-74 DPR RI. Melalui *Stand Up Comedy*, DPR RI ingin mengajak masyarakat melek politik dan menyampaikan kritiknya dengan gaya *zaman now*. "Kami menyadari bahwa segala tindak lanjut kami di DPR pasti akan mengundang perhatian publik dan jadi penilaian masyarakat. Karena itu, jika DPR-nya baik maka kita semua akan menikmati semua hasilnya," imbuh politisi F-Golkar itu.

Sementara itu, Ketua Panitia Lomba *Stand Up Comedy* "Kritik DPR" Effendi Gazali mengatakan, DPR RI adalah satu-satunya parlemen di dunia yang mengadakan lomba kritik dalam bentuk *stand up comedy* dan dilaksanakan di rumahnya sendiri.

Sembari mengutip literatur dari *The Death of Critic*, penggagas Republik Mimpi ini menyampaikan bahwasanya kekuasaan akan mati, namun kritik akan tetap hidup. "Kritik akan tetap selalu hidup, maka dari itu kritik dibutuhkan dalam suatu lembaga agar lembaga tersebut dapat maju karena kritik, saran dan usulan," ungkap Effendi.

*Stand up comedy* ini diikuti 85 peserta, mulai dari komika (pembawa *stand up comedy*) profesional hingga masyarakat umum dengan menghadirkan juri profesional, antara lain Effendi Gazali, Iwel Sastra, Mo Sidik dan Abdel Achrian. Babak penyisihan dilaksanakan sejak 5 September 2019, dan menyisakan 13 peserta di babak final. Saat babak final, seluruh komika menampilkan performa terbaiknya di hadapan Anggota Dewan.

”

**...DPR RI JUGA MEMBUTUHKAN KRITIK MEMBANGUN UNTUK PENINGKATAN KINERJA DEWAN.**

Dari seluruh penampilan komika, juri mendakan tiga pemenang. Juara I diraih oleh Yudha Ilham yang berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 25 juta. Dikuti M. Aljapri sebagai Juara II dengan hadiah uang tunai sebesar Rp 15 juta dan Juara III dimenangkan oleh Oby dengan hadiah uang tunai sebesar Rp 10 juta. Sementara untuk juara favorit dengan hadiah 1 unit sepeda motor dimenangkan oleh komika bertubuh mungil asal Palu, Ical Kate yang dipilih langsung oleh Ketua DPR RI. ■ ann/sf



# UU Otsus Papua Perlu Direvisi

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon menyampaikan, Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua perlu direvisi. Dalam rapat pemantauan tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dengan Kaukus DPR untuk Papua melibatkan banyak tokoh dari Papua, pada prinsipnya banyak pihak yang menghendaki evaluasi pada UU Otsus Papua.

“Pada prinsipnya semua bersepakat bahwa ini harus ada evaluasi dan mungkin diperlukan segera revisi terhadap Undang-Undang Otsus ini. Apalagi secara durasi, dana otsus sendiri akan berakhir di 2021. Jangan nanti kita *kepepet* untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya strategis dan substansial,” jelas Fadli usai rapat yang digelar tertutup di Ruang Delegasi Ketua DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Fadli menyadari, Otsus untuk Papua memang diakui banyak manfaatnya tetapi harus ada evaluasi, dia menjabarkan evaluasi terkait banyak hal. “Evaluasi terkait dengan distribusi anggaran, pengelolaan anggaran, dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, ekonomi

rakyat, kepada pendidikan, kesehatan, sesuai dengan diamanatkan oleh UU itu. Apakah memang ini sudah berdampak langsung atau masih perlu dievaluasi,” paparnya.

Fadli juga mengungkapkan, ke depan yang akan segera diatasi adalah persolan kerukunan di Papua jangan sampai kerusuhan terulang kembali, terlebih lagi sampai menelan korban, itu yang sangat dihindari. “Garis besarnya sekarang bagaimana mengembalikan supaya ini damai dulu. Jangan ada lagi korban, insiden-insiden baru. Ada kedamaian dulu, ada ketertiban,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Musyawah dengan tokoh-tokoh Papua yang representatif juga akan digelar, termasuk bagi mahasiswa-mahasiswa dari Papua diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu lagi seluas-luasnya, jangan sampai ada halangan.

“Sekaligus permintaan-permintaan agar ada musyawarah terutama mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar, yang mungkin perlu diberikan kesempatan untuk belajar lagi dan sebagainya yang kemarin ikut aksi-aksi dan ditanggapi. Saya kira ini aspirasi yang berkembang di dalam forum diskusi ini,” kata Fadli. ■ **eko/es**



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama Anggota DPR RI dari Papua membahas evaluasi UU Otsus Papua. Foto: Abu/HR



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Medsos dan Website)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

**ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindy, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Ryan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indiantji, Mohammad Rizki Nugraha.

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldini Opie.

**ANALIS MEDIA**  
Ahyar Tibi, Depriya Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

**PENERBITAN**  
**PIMPINAN PENERBITAN**  
Dadang Prayitna, S.I.P., M.H. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurrahman

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO**  
**DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Parlemen Remaja Jalan Mengukak Dunia

**W**akil Ketua DPR RI Utut Adianto menyatakan bahwa kegiatan Parlemen Remaja tahun 2019 merupakan jalan bagi para remaja Indonesia untuk mengukak dunia. Ia meminta agar Parlemen Remaja bisa terus dilakukan, karena memiliki *output* positif bagi para remaja sebagai generasi bangsa. Utut juga menyampaikan, diharapkan dengan adanya kegiatan Parlemen Remaja tersebut para pesertanya bisa menjadi anak-anak yang mencintai Indonesia.

“Dari kegiatan ini, mereka bisa mengukak jalan mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan mengenal secara lebih jauh tentang Indonesia. Dan dari kegiatan ini mereka akan menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara,” kata Utut saat membuka acara simulasi Rapat Paripurna yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Parlemen Remaja 2019 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Pimpinan DPR RI Koordinator BAKN, BURT, dan Hubungan Antar Lembaga ini mengaku senang karena tema yang diangkat Parlemen Remaja 2019 sangatlah membumi dan bisa dikerjakan sehari-hari oleh remaja, yakni ‘Remaja Peduli Lingkungan. Cinta Bumi Cinta Lingkungan’. Usai menyampaikan sambutan, Utut didaulat untuk memukul gong sebagai tanda dibukanya simulasi Rapat Paripurna kegiatan Parlemen Remaja 2019.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Lembaga Pusat dan Daerah Winarni Dien Monoarfa yang hadir mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan, KLHK memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Parlemen Remaja 2019 yang

”

**PARLEMEN REMAJA BISA TERUS DILAKUKAN, KARENA MEMILIKI OUTPUT POSITIF BAGI PARA REMAJA SEBAGAI GENERASI BANGSA**

mengambil tema yang sangat dekat sekali dengan tupoksi Menteri LHK yaitu ‘Cinta Bumi dan Cinta Lingkungan’.

“Remaja dan lingkungan hidup menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena remaja adalah sebagai agen perubahan. Upaya penguatan ekonomi nasional dan

perbaikan kualitas lingkungan hidup Indonesia di masa depan, haruslah diawali dengan remaja dan pemuda sebagai agen perubahan,” tutur Winarni.

Dikatakannya, KLHK mendorong terciptanya kader-kader remaja untuk dapat berperan aktif dalam aktifitas perbaikan kualitas lingkungan hidup di Indonesia, yakni generasi yang memiliki gaya hidup ramah lingkungan, sikap bijaksana dan bertanggung jawab.

Turut hadir dalam pembukaan simulasi Rapat Paripurna kegiatan Parlemen Remaja 2019 ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI Y.O.I Tahapari, Kepala Humas DPR RI Minarni, dan 128 peserta Parlemen Remaja 2019. ■ dep/sf



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto berfoto bersama peserta Parlemen Remaja 2019. Foto: Kresno/HR

# Fahri Hamzah Luncurkan Buku 'Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia'

**W**akil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali meluncurkan buku terbarunya dengan judul 'Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia'. Buku tersebut berisi tentang berbagai catatan kritis dari seorang Fahri Hamzah selama ia mengemban tugas sebagai Pimpinan DPR RI periode 2014-2019.

"Buku ini berisi tentang cara kita melakukan berbagai koreksi dan melihat peluang sektoral, seperti bagaimana melihat angka bonus demografi nasional sekarang yang bagus," ujar Fahri usai menjadi narasumber utama dalam acara peluncuran buku terbarunya itu di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menjelaskan, bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimaksimalkan dengan menerapkan proses edukasi terhadap para generasi pemuda dengan pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan, asuransi dan



**CARA KITA MELAKUKAN BERBAGAI KOREKSI DAN MELIHAT PELUANG SEKTORAL, SEPERTI BAGAIMANA MELIHAT ANGKA BONUS DEMOGRAFI NASIONAL SEKARANG YANG BAGUS**



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meluncurkan buku "Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia". Foto: Kresno/HR

kesehatan.

Proses edukasi tersebut dipandang Fahri sangat krusial untuk segera dilakukan, supaya para generasi muda memiliki daya pikul yang tinggi bukan hanya terhadap keluarganya tetapi juga terhadap beban nasional terutama dalam meningkatkan perekonomian secara masif.

"Jika tidak dilakukan berbagai edukasi, maka yang terjadi adalah timbulnya pengangguran. Pengangguran adalah hal yang berbahaya bagi negara tidak saja dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi sosial seperti potensi kriminalitas yang dapat meningkat," tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Apalagi, sambung Fahri, dalam sekian tahun ke depan akan muncul adanya *aging population* yang

merupakan jumlah antitesis daripada bonus demografi yaitu jumlah orang tua yang harus dipikul lebih banyak dibandingkan jumlah anak muda yang memikul.

"Ini yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, kita memerlukan arah baru, kita perlu *fix*-kan sistem kesejahteraan kita mulai dari pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan, asuransi, kesehatan dan sebagainya itu harus kita perbaiki. Kita perlu cara baru dalam mengelola serta meningkatkan kesejahteraan secara lebih masif," pungkash Fahri.

Turut hadir sebagai pembicara pada acara peluncuran buku 'Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia' ini yaitu Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf (Fraksi Demokrat), Pakar Ekonomi Rizal Ramli, dan Tokoh Nasional Sandiaga Salahuddin Uno. ■ pun/es

## Seleksi Capim KPK Sangat Terbuka

**K**omisi III DPR RI tetap berkomitmen menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka. Keterbukaan ini merupakan bentuk tanggung jawab Komisi III DPR RI kepada rakyat untuk mendapatkan komisioner yang berintegritas dan akuntabel.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat menerima lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ingin memberi masukan seputar calon komisioner KPK yang akan mengikuti uji kelayakan. “Komisi III akan melakukan *fit and proper test* secara terbuka. Komisi III merespon semua masukan dari masyarakat,” kata Herman di ruang rapat Komisi III DPR,

Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tersebut hadir Indonesia Police Watch (IPW) yang memberi masukan kepada Komisi III DPR RI seputar jejak rekam para calon komisioner KPK. Ketua IPW Neta S Pane mengungkap keburukan KPK yang menjadikan penyidikan KPK Novel Baswedan begitu kebal hukum. Banyak kasus menyangkut Novel berlalu begitu saja tanpa diadili. Bahkan, banyak tersangka yang sudah ditetapkan KPK masih bebas berkeliaran.

“Jangan memberi masukan dari lorong gelap. Silakan datang ke DPR sebagai rumah rakyat. Kami wakil rakyat selalau hargaai masukan dari masyarakat,” kilah Herman lagi. Sementara Anggota Komisi III DPR



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery.  
Foto: Gerald/HR

RI Masinton Pasaribu menambahkan, para wakil rakyat bekerja sesuai konstitusi dan perundang-undangan. Sebagai wakil rakyat, pasti akan menyerap masukan rakyat yang dalam konteks ini masukan menyangkut KPK dan para calon komisioner KPK. ■ mh/sf

## Lemhannas Diminta Perkuat Ketahanan Papua

**A**nggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra menegaskan terkait kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat akhir-akhir ini, ia meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) harus segera memperkuat nilai ketahanan daerah tersebut agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mempertanyakan nilai ketahanan dua provinsi di timur Indonesia itu.

“Selama ini kajiannya dari Papua itu, berapa nilai ketahanannya sampai bisa terjadi kasus kerusuhan seperti itu. Apakah nilai ketahanannya tanggung atau di bawah tanggung, ini harus dijelaskan,” papar Supiadin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama Lemhannas dan Sesjen Wantannas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).

Politisi Partai NasDem ini mengatakan daerah-daerah di

Indonesia yang masih tertinggal jauh harus segera dilakukan pembangunan yang bersifat prioritas, serta penguatan terhadap ideologi bangsa dan negara terhadap pemerintah.

“Harus ada prioritas pembangunan dari pemerintah terhadap daerah-daerah yang masih tertinggal, atau yang mempunyai ideologi ketahanan yang lemah. Sehingga pemerintah harus mencari cara bagaimana meningkatkan ideologi di daerah tersebut,” pesan Supiadin.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat tersebut menilai Lemhannas harus segera menyampaikan nilai ketahanan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga jika ada yang masih lemah, perlu segera diperkuat agar kejadian seperti di Papua tidak terulang.

“Saya meminta kepada Lemhannas agar diberikan gambaran berapa

nilai ketahanan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga kami bisa mempunyai gambaran juga dalam menganalisis permasalahan tersebut, tentunya dengan harapan agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkas Supiadin. ■ tn/sf



Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra.  
Foto: Gerald/HR

# Komisi II **Setujui** Anggaran Sejumlah Mitra Kerja



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali saat berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN. Foto: Runi/HR

**K**omisi II DPR RI menyetujui alokasi anggaran tahun 2020 sejumlah mitra kerjanya. Alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2020 disetujui sebesar Rp 2,15 triliun dengan tambahan anggaran sebesar Rp 1,03 triliun. Kemudian anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 2,96 triliun dengan tambahan anggaran sebesar Rp 349 miliar.

Berikutnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2020 sebesar Rp 10,1 triliun dengan tambahan

anggaran 4,12 triliun. Demikian disimpulkan dalam rapat Komisi II dengan mitra kerjanya terkait rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga pada APBN 2020.

“Karena ini sudah melalui pembahasan yang cukup panjang dan *konsinyering*, maka hari ini tinggal pengesahan apa yang sudah dibahas,” ungkap Zainudin Amali di sela-sela rapat di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Sementara itu, pagu anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2020 sebesar Rp 338 miliar dengan tambahan anggaran Rp

20,8 miliar. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar Rp 190 miliar dengan usulan tambahan anggaran Rp 166 miliar, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebesar Rp 166 miliar dengan tambahan anggaran Rp 110 miliar.

Selanjutnya, pembahasan anggaran tersebut akan dilanjutkan ke Badan Anggaran DPR RI. Komisi II DPR RI meminta kepada Banggar agar memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam alokasi anggaran atau pagu definitif masing-masing kementerian untuk tahun 2020. ■ [ann/sf](#)

# Alat Pengawasan SDKP Palembang Perlu Diperkuat

**K**etua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan infrastruktur sarana dan prasarana Satuan Pengawasan (Satwas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Palembang perlu terus diperkuat dengan kemampuan dan peralatan pengawasan yang mumpuni. Pasalnya selain alat-alat pengawasan yang masih minim, sedangkan perairan tawar yang luas, hanya didukung oleh satu kapal.

“Untuk itu perlu tambahan kapal. Hal tersebut dimaksud agar mempermudah para nelayan dalam membudidayakan ikan. Ini pasti akan terus kita perkuat,” kata Edhy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau sarpras SDKP Palembang,

Sumatera Selatan, Kamis (5/9).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, Komisi IV DPR RI tidak akan pernah berhenti untuk memberikan dukungan terutama anggaran yang dibutuhkan mitra kerja maupun masyarakat. Karena ini merupakan peran dan fungsi DPR RI. “Dimana Komisi IV DPR RI dapat merepresentasikan dalam mewakili masyarakat dengan memberikan saran, mengkaji, maupun mengawasi,” pungkasnya.

Di sisi lain, Edhy meminta Pemerintah dapat memberikan pengawasan bersifat pembinaan dini bagi nelayan. Pasalnya pelanggaran penggunaan alat tangkap ikan sudah meluas di daerah. Saat melakukan aktifitas penangkapan

ikan, kebanyakan dari nelayan itu menggunakan racun ikan dan setrum. Untuk itu, nelayan sebagai bagian dari masyarakat yang harus di bina, dapat diberikan arahan, tidak dengan menggunakan jalur hukum.

“Mereka ini *kan* nelayan. Jangan karena mereka melanggar, langsung dipenjara. Itu harus ditanya dulu kenapa mereka terpaksa melakukan itu. Setelah diberi pembinaan dan arahan, tapi nelayan masih belum mengerti, di sini peran Pemerintah dapat melakukan tindak tegas untuk proses pidana. Jika diberikan arahan dan contoh yang benar, saya yakin para nelayan akan mengerti dan mengikuti,” terang legislator dapil Sumsel itu. ■ hnm/sf



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI mengunjungi SDKP Palembang. Foto: Hanum/HR

# UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan **Lindungi Kekayaan Hayati dan Hewani**

**A**nggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai dengan disepakatinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan maka Indonesia akan terlindungi dari berbagai hal yang merusak kekayaan hayati dan hewani dalam negeri.

Demikian disampaikan Andi usai rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman beserta jajaran dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (11/9).

“Komisi IV DPR RI dan Pemerintah baru saja menyepakati RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang akan disusul dengan pengesahannya di rapat paripurna mendatang. Intinya, dengan adanya undang-undang karantina nanti, yang didalamnya menyepakati pembentukan badan karantina maka bidang karantina di Indonesia akan terintegrasi,” papar Andi.

Politisi F-PKS ini menerangkan, sebelumnya masalah karantina tidak terintegrasi alias ada pada masing-masing sektor baik itu pertanian, kelautan dan kehutanan, sehingga menyebabkan peluang masuknya organisme-organisme berbahaya tumbuhan dan hewan dalam negeri menjadi sangat tinggi.

Namun dengan adanya undang-undang ini yang didalamnya mengamanatkan pembentukan Badan Karantina Nasional, maka kekayaan hayati dan hewani dalam negeri



Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyerahkan pandangan Fraksi terhadap RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI. Foto: OJI/HR

akan terlindungi. Selain itu, lanjut Andi, yang tidak kalah pentingnya adalah RUU ini sebagai sebuah jaminan kepastian hukum bagi para pengusaha, sehingga bisa dijadikan patokan bagi dalam berinvestasi.

“Ketiga yang paling utama adalah RUU Karantina ini sebagai pertahanan negara. Karena bukan tidak mungkin menyerang suatu negara itu tidak hanya dengan senjata tajam, namun lewat penyakit-penyakit dari luar yang bisa mematikan tumbuhan, dan hewan asli dalam negeri. Kami menyambut baik agar UU ini segera disahkan dan berharap bisa efektif, kemudian pemerintah segera menyiapkan

peraturan turunannya. Ini sebuah prestasi tersendiri bagi Komisi IV DPR RI Periode 2014 – 2019 ini,” tukasnya.

Sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman meyakini dengan digabungkannya Karantina menjadi satu kesatuan antara Karantina Pertanian, Karantina Perikanan dan Karantina Kelautan maka akan semakin efektif, efisien dan kuat. Tidak hanya itu pelayanannya pun menjadi jauh lebih baik, karena berada dalam satu atap. “Intinya bagaimana kita melayani dengan baik, transparan dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat,” pungkas Amran. ■ ayu/es

# Komisi V Dukung Pembangunan Transportasi Kereta Bandara Adi Soemarmo



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur kereta Bandara Adi Soemarno, Solo. Foto: Runi/HR

**K**omisi V DPR RI memberikan dukungan terhadap pembangunan secara terpadu sistem transportasi kereta bandara Adi Soemarmo di Solo, Jawa Tengah, yang saat ini masih dalam progres pembangunan. Rencananya transportasi terpadu kereta bandara ini akan diresmikan pada Oktober mendatang. Namun Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis memberikan sejumlah catatan terhadap pembangunan sistem transportasi ini.

“Angkasa Pura saat menjalankan proses pembangunan perlu melakukan kalkulasi dengan melibatkan semua komponen perguruan tinggi yang ahli dan memahami transportasi, agar kereta yang akan dioperasikan bulan depan bisa betul-betul bermanfaat dan dapat dirasakan masyarakat,” ungkap Fary usai memimpin Tim Kunjungan

Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur kereta Bandara Adi Soemarno, Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/9).

Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan, ada pembangunan infrastruktur di berbagai tempat, seperti LRT di Kota Palembang, namun tidak diperhitungkan manfaat dan kapasitas penumpangnya. Sehingga sampai sekarang penumpangnya makin sepi, bahkan rugi dan sekarang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk biaya operasionalnya. Untuk itu ia menekankan kejadian seperti itu jangan terulang lagi.

Selain itu, Komisi V DPR RI mendorong pembangunan jalur kereta ini satu rangkaian dengan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta, sehingga bisa terintegrasi ke berbagai daerah lain. “Komisi V akan membahas lebih lanjut dengan Dirjen Kereta Api, sehingga

dana yang kita berikan kurang lebih Rp 600 miliar bisa digunakan sesuai prosedur. Dan jika ada tambahan yang dibutuhkan, kita akan tambahkan,” imbuhnya.

Legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini berharap di sisa waktu satu bulan penyelesaian sampai pada waktunya peresmian, pembangunan ini bisa melibatkan orang-orang yang memahami infrastruktur pembangunan dengan matang. Sehingga pembangunan tersebut pada saat diresmikan bisa berfungsi dengan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi meminta Kereta Api Indonesia, Angkasa Pura dan kalangan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret Solo dan ahli transportasi untuk bersinergi melalui *Forum Group Discussion* (FGD). Sehingga apapun dari kebijakan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan. Ia pun berharap jalur kereta api di Solo Balapan sampai dengan Bandara Adi Sumarmo nantinya bisa dirangkai dengan kereta pariwisata yang menuju ke Yogyakarta.

“Saya menginginkan fungsi Bandara Adi Soemarmo dan fungsi Bandara Yogya Baru (NYIA) diharapkan bisa menjadi akses utama bagi pariwisata, baik wisatawan domestik maupun luar. Oleh karena itu diharapkan nantinya peran bandara dengan peran tol dan kereta api bisa bersinergi, sehingga wisatawan bisa merasakan perjalanan dengan nyaman,” harap politisi PDI-Perjuangan itu. ■ mi/sf

# Pembangunan Bendungan Waeapo Harus Diselesaikan

**P**embangunan Bendungan Waeapo pengerjaannya terbilang lamban. Sudah dua tahun pembangunan berjalan, namun kemajuan fisik proyek bendungan tersebut baru mencapai 2,53 persen. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buru untuk segera menyelesaikan pembangunan Bendungan Waeapo.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi V dengan Wakil Bupati Buru Anus Besan beserta jajaran, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

(BPTD) Ditjen Perhubungan Darat Provinsi Maluku Herman Armanda, DPRD Kabupaten Buru dalam rangka peninjauan Infrastruktur dan Transportasi Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Kamis (5/9).

“Kami sangat berkepentingan akan suksesnya kemajuan pembangunan Bendungan Waeapo. Proyek infrastruktur Bendungan Waeapo yang merupakan bagian dari program strategis nasional,” ujar Sigit sembari mengingatkan bahwasanya anggaran proyek Bendungan Waeapo ini adalah sebesar Rp 2,1 triliun.

Sigit yang merupakan salah satu supervisor pembangunan Bendungan

Waeapo merasa geram karena didapati progress pembangunan bendungan baru mencapai 2,53 persen saja. “Kalau persentasenya seperti ini, apa yang bisa kami tinjau,” tukas legislator dapil Jawa Timur I itu.

Dengan tegas, ia meminta Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Haryono Utomo agar proyek strategis ini pengerjaannya dipercepat. Ia juga menginginkan adanya kunjungan kedua untuk melihat langsung Proyek Bendungan Waeapo ini. “Kepala Balai, sudah dua tahun progresnya masih dua persen. Kami berharap ada percepatan,” tegur Sigit.

Politisi F-PKS ini sempat menyinggung surat dari Ketua Komisi A DPRD Buru tanggal 26 Juni 2019 lalu yang meminta Komisi V DPR RI berkunjung dan melihat progres pembangunan Bendungan Waeapo. “Sebenarnya, kami ingin ke Bendungan Waeapo. Kami ingin melihat langsung infrastrukturnya, seberapa besar kemajuannya.. Kami berharap kunjungan kedua nanti, progres Bendungan Waeapo sudah lebih bagus,” pungkas Sigit. ■ pun/es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Wakil Bupati Buru beserta jajaran. Foto: Puntho/HR

# RUU Desain Industri Upaya Kejar **Ketertinggalan** di Era Persaingan Global

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri merupakan jawaban atas perkembangan zaman dan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalan sektor industri dalam era persaingan global yang saat ini semakin diskriminatif, komparatif, dan kompetitif.

“Tuntutan akan penyesuaian pengaturan mengenai desain industri mutlak diperlukan melalui perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang tentang Desain Industri,” kata Inas saat

memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan civitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam rangka mendapatkan pandangan, tanggapan, dan masukan dari para akademisi di Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.

Saat ini, di masa akhir periode 2014 – 2019 Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah sedang gencar membahas Rancangan

Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang merupakan usul inisiatif Pemerintah.

”

**REVISI AKAN DILAKUKAN LEBIH DARI 50 PERSEN AGAR BISA MENJAWAB KEBUTUHAN MASYARAKAT.**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri akan direvisi dengan peraturan perundangundangan yang baru. Politisi Fraksi Hanura ini mengisyaratkan, revisi akan dilakukan lebih dari 50 persen agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

Legislator dapil Banten III ini memaparkan pokok-pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri yaitu mengenai definisi desain industri, sistem perlindungan desain industri, desain industri yang tidak dapat diberikan perlindungan.

Kemudian, hak pemegang desain industri melalui sistem pendaftaran dan pencatatan, larangan pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak desain industri di tempat perdagangan yang dikelolanya, konsep pemakai terdahulu, pelaksanaan hak desain industri oleh pemerintah, permohonan melalui pendaftaran internasional, permohonan banding, dan hak desain industri dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. ■ as/es



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir. Foto: Agung/HR

# Revisi UU Desain Industri Harus Lindungi UMKM



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan civitas akademika UPN "Veteran" Jawa Timur. Foto: Ayu/HR

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menilai revisi atau penggantian undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mutlak harus dilakukan, namun tetap harus melindungi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Tuntutan penyesuaian pengaturan mengenai Desain Industri mutlak diperlukan. Namun tetap perlu ada perlindungan terhadap UMKM. Sebab jika tidak ada perlindungan, maka perusahaan besar terutama dari luar akan berlomba-lomba untuk mendaftarkan desain industrinya, kondisi tersebut akan membuat UMKM terdesak," ujar Azam saat pertemuan dengan civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, di Surabaya, Senin (9/9).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan meskipun desain industri tersebut merupakan sebuah tekanan atau kewajiban dari *World Trade Organization* (WTO) yang tercantum dalam perjanjian *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), DPR RI tetap berpihak pada kemampuan dalam negeri terutama UMKM.

Menurut Azam, tidak dipungkiri banyak desain industri UMKM yang terinisiasi atau terinspirasi dari desain-desain industri yang ada. Munculnya revisi atau perubahan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini nantinya diharapkan tidak mendistorsi keberadaan dan pertumbuhan UMKM yang jumlahnya ribuan. Pasalnya, sekitar enam puluh persen kekuatan industri dalam negeri merupakan UMKM.

Lebih lanjut Azam mengapresiasi

”

**TUNTUTAN PENYESUAIAN PENGATURAN MENGENAI DESAIN INDUSTRI MUTLAK DIPERLUKAN. NAMUN TETAP PERLU ADA PERLINDUNGAN TERHADAP UMKM.**

banyak masukan dari yang diberikan oleh civitas akademika dari UPN "Veteran" Jatim yang sekaligus merupakan pelaku terkait revisi UU Desain Industri. Salah satunya terkait definisi dari desain industri, dimana definisi desain industri yang ada dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 ini dinilai masih sangat sempit. Padahal desain industri tidak hanya terkait penampilan luar saja, namun juga lebih luas dari itu.

Bagi politisi dapil Jawa Timur III ini, masukan-masukan tersebut dapat memperkaya DPR beserta pemerintah dalam menyusun revisi UU Desain Industri nanti. Oleh karenanya pihaknya akan memasukan hal tersebut dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Desain Industri.

Pada kesempatan itu, Rektor UPN "Veteran" Jatim Ahmad Fauzi mengatakan, selain definisi dari desain industri yang dinilai masih sangat sempit, masa waktu pendaftaran dan permohonan hak desain industri juga harus diperpanjang. Begitupun terkait sanksi bagi pelanggar hak desain industri selama ini yang dinilai terlalu berat. Ia meminta sebelum dihadirkan sanksi pidana, agar pelanggar terlebih dahulu mendapatkan sanksi administratif.

■ ayu/es

# Desain Industri, Kekayaan Intelektual yang Perlu Dilindungi

**S**ebagai suatu karya kreatif manusia, desain industri merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan agar pencipta desain dapat memperoleh penghargaan atas hak-hak intelektualnya dan terhindar dari tindakan curang orang lain yang berupaya untuk mengambil keuntungan dengan cara tidak etis terhadap karya kreatifnya.

Demikian hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Desain Industri Komisi VI DPR RI dengan jajaran civitas akademika Universitas Telkom Bandung.

“Saat ini Komisi VI DPR RI bersama pemerintah sedang melakukan pembahasan RUU tentang Desain Industri sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sebagai dampak dari perkembangan industri yang sangat pesat, teknologi dan perkembangan hukum internasional,” ucap Hekal di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/9).

Seperti diketahui, lanjutnya, paradigma perlindungan desain industri di dunia internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri masih belum menyesuaikan perkembangan tersebut.

Hekal menyampaikan, keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangan di

bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dengan *trade related aspect of intellectual property rights*.

“RUU Desain Industri merupakan RUU yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019. Pembahasan tingkat I diawali dengan rapat kerja dengan menteri terkait yang mendapat tugas dari Presiden untuk membahas RUU Desain Industri dan dilanjutkan dengan membentuk Panitia Kerja RUU Desain Industri,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dikatakannya, saat ini Panja telah terbentuk dan siap melakukan pembahasan berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun oleh masing-masing fraksi di DPR RI. Meskipun berada pada penghujung masa bakti anggota DPR RI periode 2014-2019, Komisi VI DPR RI bersama pemerintah bertekad untuk melakukan pembahasan RUU Desain Industri.

“Guna menghasilkan rumusan pengaturan desain industri yang

berkeadilan dan kepastian hukum, beberapa materi krusial dalam RUU Desain Industri perlu dikritisi, diantaranya yaitu mengenai perubahan definisi desain industri dan jangka waktu perlindungan desain industri, pemeriksaan substansi atas kebaruan desain industri, komisi banding desain industri, dan penggunaan hak desain industri dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,” paparnya.

Dalam kaitan ini, sambung Hekal, Panja RUU Desain Industri Komisi VI DPR RI menganggap penting untuk melakukan pertemuan dan diskusi dengan kalangan akademisi. “Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperoleh masukan terhadap draft RUU Desain Industri, serta menambah pengetahuan dan pemahaman dari para akademisi Telkom University. Hasil dari pertemuan ini diharapkan nantinya akan dapat menyempurnakan dan melengkapi RUU desain industri yang sedang dibahas di Komisi VI DPR RI,” pungkasnya. ■ dep/es



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal memimpin pertemuan Panja RUU Desain Industri Komisi VI DPR RI dengan jajaran civitas akademika Universitas Telkom Bandung. Foto: Devi/HR



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau Project RDMP PT. Pertamina (Persero) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Foto: Andri/HR

## Komisi VII Dukung Pengembangan Kilang RDMP Balikpapan

**K**etua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, akan mendukung penuh pengembangan *Refinery Development Master Plan (RDMP)* PT. Pertamina (Persero) dan optimalisasi kegiatan usaha gas bumi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tujuannya meningkatkan kapasitas kilang *Refinery Unit (RU) V* guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak hanya tersedia, tapi juga harus dipikirkan sumbernya di dalam negeri. Selain itu, pengembangan Kilang RDMP Balikpapan juga diharapkan dapat mengisi kebutuhan BBM berstandar

euro 4. Karena, selain kapasitas produksi bertambah, kompleksitas produksi yang dihasilkan juga meningkat.

“Pemerintah Indonesia harus mulai mengantisipasi kebutuhan akan BBM dengan standar ini,” kata Gus Irawan saat meninjau Project RDMP PT Pertamina (Persero) dan Optimalisasi Kegiatan Usaha Gas Bumi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (6/9).

Dalam kesempatan itu Direktur Megaprojek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang mengatakan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan pembangunan *jetty* konstruksi dan *flare*. Demikian juga penyiapan lahan untuk utilitis sudah selesai. Sementara untuk

unit proses sedang *on progress*, saat ini mencapai 80 persen.

“Dari sisi tenaga kerja, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, mengadakan pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja lokal agar ketika pengerjaan konstruksi nanti, tenaga kerja lokal siap bersaing dengan tenaga kerja dari luar,” terang Ignatius Tallulembang.

Berbeda dengan proyek-proyek kilang lain, RDMP Balikpapan dikerjakan sendiri oleh Pertamina tanpa partner. Proyek kilang Balikpapan terdiri dari 2 tahap yang ditargetkan akan selesai pada Juni 2021. Tahap pertama selesai tahun 2019 dan tahap kedua pada 2021. Proyek ini diperkirakan membutuhkan dana Rp 62,1 triliun.

Project RDMP PT. Pertamina (Persero) Kilang Balikpapan yang kapasitas produksinya saat ini 260.000 barel per hari (bph), akan di tingkatkan menjadi 360.000 bph setelah dimodifikasi. Nantinya produk-produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kilang Balikpapan akan ditingkatkan hingga (memenuhi spesifikasi) Euro 5 dari sebelumnya Euro 2. ■ man/es

## Komisi VII Pantau Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang di Kaltim

**K**omisi VII DPR RI ingin memastikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak terkait adanya permasalahan lingkungan hidup. Mengingat, di Kaltim sendiri seringkali terdapat masalah lingkungan yang cukup serius, dimana banyak galian tambang yang tidak direklamasi. Untuk itu Komisi VII ingin memantau dan memastikan bekas tambang aktivitas tambang bisa dilakukan pemulihan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim, Ditjen Kementerian LHK, BPPT dan LIPI di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, Jumat (6/9).

“Untuk pemulihan ada mitra Komisi VII yang bisa terlibat langsung yaitu Kementerian LHK, Kementerian ESDM, ada BPPT yang terkait dengan teknologi dan juga LIPI, jadi kita berharap mitra kerja Komisi VII bersinergi untuk

mewujudkan bahwa pemulihan pasca tambang secara khusus maupun pemulihan lingkungan secara umum bisa berjalan dengan baik,” kata politisi F-PKB ini.

Terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Syaikhul menerangkan ada perencanaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kaltim terkait IKN di Tahura Bukit Soeharto yang sudah terpetakan. Sehingga ada lahan pemulihan dan lahan hutan lindung. Ia minta perencanaan tersebut kedepannya ditinjau ulang dan disesuaikan dengan perencanaan dari pemerintah pusat.

Syaikhul meminta kepada LIPI dan BPPT membuat kajian di Tahura Bukit Soeharto dengan citra satelit agar data yang dibutuhkan kajiannya lebih komprehensif. “Kita ingin LIPI dan BPPT membuat kajian yang komprehensif agar kita tahu berapa besar biaya yang akan dihabiskan untuk pemulihan lingkungan yang rusak,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali.  
Foto: Arief/HR

bahwa Kementerian ESDM hanya membina pertambangan yang legal. Sedangkan ilegal, itu merupakan ranah penegak hukum. Saat ini Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (gakkum) didorong untuk masuk ke ranah tersebut, minimal memberi peringatan untuk meminimalisir pelanggaran. “Tidak mungkin kita melakukan reklamasi dan pemulihan pasca tambang tetapi di sisi lain penambangan ilegal terus berlangsung,” pungkasnya. ■ afr/es

## Komisi VIII Bahas Anggaran Kemen PPPA



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis.  
Foto: Arief/HR

**K**omisi VIII DPR RI kembali membahas anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada RAPBN Tahun Anggaran 2020. Dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri PPPA Yohana Yambise itu, pagu anggaran 2020 mencapai Rp 273.641.802.000.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis yang memimpin rapat mengatakan, anggaran tahun 2020 bagi Kementerian PPPA harus berpihak pada penyelesaian berbagai permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Data lapangan menyebutkan, terjadi signifikansi tingkatan serta kompleksitas permasalahan perempuan dan anak,” kata lhsan

saat memimpin rapat di Ruang Rapat Komisi VIII, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).

Oleh karena itu, politisi PKS tersebut berharap, kebijakan Menteri PPPA harus mampu memenuhi kebutuhan mendesak di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menteri PPPA diimbau mampu berkontribusi optimal mewujudkan kesejahteraan anak dan perempuan.

“Rencana anggaran 2020 yang sudah disusun dengan baik untuk mendapatkan output dan outcome yang optimal. Pembangunan kesejahteraan sosial harus dibangun dari pondasi melayani masyarakat dengan hati yang bersih,” kilah legislator asal Sumatera Utara tersebut. ■ mh/sf



# GINB Jawab Kebutuhan Listrik Kaltim

**K**ebudayaan proyek Gardu Induk New Balikpapan (GINB) 150 KV dirasa telah mampu menjawab kebutuhan listrik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Mengingat, Kaltim adalah kawasan yang erat hubungannya dengan kawasan tambang maka ketersediaan listrik yang memadai adalah hal yang penting guna mendatangkan investor.

Karenanya, Wakil Ketua Komisi VII Tamsil Linrung memberikan apresiasinya atas proyek strategis yang digarap oleh PT. PLN dalam pembangunan gardu induk yang berlokasi dekat dengan Bandara Sepinggang tersebut. Demikian diungkapkan usai memimpin kunjungan kerja spesifik ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, (6/9).

“Kehadiran Gardu Induk New

Balikpapan (GINB) sebesar 150 KV saya kira patut untuk kita apresiasi, kita beri dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh PLN. Apalagi saya melihat dalam pembangunan infrastruktur jalan misalnya itu juga langsung bisa diakses masyarakat, jadi saya kira kehadiran PLN semakin dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” ujar Tamsil Linrung.

Setelah berdialog dengan Direktur Bisnis PLN Regional Kalimantan dan Sulawesi, Samsul Huda, politisi F-PKS ini mengatakan bahwa keberadaan GINB mampu menjawab kebutuhan listrik hingga separuh Balikpapan. Sehingga membuat jumlah listrik di Kaltim pun menjadi surplus. Diharapkan surplus tersebut mampu mengaliri listrik di daerah luar Kalimantan Timur.

“Kehadiran 150 KV bisa menerangi separuh dari Balikpapan, kebutuhan separuh dari Balikpapan bisa tertangani oleh kehadiran gardu ini. Saya kira ini bagus dan ini sudah terkoneksi dengan sistem jadi di luar sini juga bisa dipergunakan,” terang politisi dapil Sulawesi Selatan I itu.

Terlebih, Kaltim adalah provinsi yang dipilih Presiden Jokowi dalam hal rencana pemindahan ibu kota. Sehingga ketersediaan listrik harus diimbangi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang akan masuk. Perencanaan kelistrikan yang matang pun perlu dibuat oleh PLN sebagai langkah untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota baru.

“Pembangunan ini sangat bermanfaat. PLN itu harus memberikan jaminan bahwa kelistrikan di Indonesia ini tidak akan mengalami *blackout*. Terlebih Kaltim adalah daerah yang direncanakan menjadi calon ibukota baru,” ujar Tamsil. Turut serta dalam kunjungan ini sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI yakni Denny Jaya Abri Yani, Firmandez, Ari Yusnita, Nawafie Saleh, Joko Purwanto, Ervita, Firmandez, dan Taslim Aziz. ■ hs/es



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Hendra/HR

# Komisi IX Luncurkan Buku 'Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional'

**K**omisi IX DPR RI meluncurkan buku putih berjudul “Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Buku ini berisi uraian permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan diakhiri dengan serangkaian rekomendasi dan aksi yang disepakati, sehingga diharapkan menjadi kado perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan JKN. Selain itu diharapkan buku ini menjadi *milestone* dan pengingat semua pihak untuk menjaga kesinambungan program JKN.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat peluncuran buku yang merupakan *out put* dari serangkaian pertemuan seluruh pemangku kepentingan JKN yang dilakukan sepanjang tahun 2018. Serta menjadi hasil rapat Komisi IX DPR RI dengan pemerintah hingga bulan Mei tahun 2019. Acara berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (6/9), dengan dihadiri Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan pihak terkait lainnya.

“Buku ini sebenarnya disusun sudah sejak satu tahun yang lalu, mestinya keluar pada awal tahun 2019 kemarin. Namun saat itu banyak hiruk pikuk dan kesibukan menjelang Pemilu serentak April 2019 lalu. Hingga baru hari ini kami bisa *me-launching* buku putih ini. Dikatakan putih, karena dalam buku ini tidak ada kepentingan apapun, murni untuk memperbaiki sistem JKN



Komisi IX DPR RI meluncurkan buku putih berjudul “Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Foto: Gerald/HR

yang pada akhirnya bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Terutama masyarakat yang tidak mampu,” papar Dede.

Dijelaskan Dede, permasalahan defisit anggaran BPJS yang disusul dengan usulan kenaikan iuran atau premi BPJS yang belakangan mencuat, merupakan satu dari sekian banyak permasalahan dari sistem JKN negeri ini. Pasalnya permasalahan itu sudah dapat diperkirakan sejak dimulai adanya penggolongan penyakit (Ina-CBG's), perhitungan aktuarial, konsep pelayanan yang baik, dan tanggung jawab sosial (dalam hal ini ada tanggung jawab negara dan ada tanggung jawab masyarakat).

Sehingga seolah-olah menaikkan iuran atau premi menjadi opsi utama, yang tidak harus disertai oleh

perbaikan sistem. Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai diperlukan pemikiran dan terobosan khusus secara sistemik untuk memikirkan strategi keberlanjutan program JKN, dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.

“Di buku ini berisikan tentang ruang-ruang perbaikan untuk JKN. Ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Komisi IX DPR kepada masyarakat Indonesia dengan harapan bahwa Komisi IX DPR dapat berkontribusi aktif memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan pada umumnya, dan presiden RI khususnya. Dalam rangka mencari solusi bersama terhadap permasalahan JKN, demi menjaga keberlangsungan penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia,” tambahnya. ■ ayu/sf

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati.  
Foto: Mentari/HR

## Komisi X Pertanyakan Penambahan Anggaran Kemendikbud

Bappenas RI. Pasalnya berdasarkan risalah rapat empat kali berturut turut kemarin, tidak ada pemaparan tentang penambahan anggaran untuk pembangunan. Kami butuh penjelasan secara komprehensif,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Sementara itu, terhadap pagu anggaran Kemendikbud yang disetujui sejumlah Rp 35,701 triliun, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amalia meminta Kemendikbud untuk tidak mengesampingkan pengembangan pendidikan bagi kaum disabilitas.

“Ada hal yang tidak boleh luput dari pembicaraan dalam persetujuan pagu anggaran Kemendikbud. Pertama, peraturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas terutama tentang pendidikan, Peningkatan kualitas SLB (Sekolah Luar Biasa), standar pelayanan untuk sekolah inklusi, peningkatan guru di sekolah inklusi. Supaya kedepan kita perlu memberikan perhatian yang khusus terkait ini,” tegasnya.

Dalam rapat ini, Anggota Komisi X DPR RI Amran juga menyuarakan evaluasi terhadap program Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar tepat sasaran. “KIP yang belum tepat sasaran menurut saya perlu dievaluasi, terutama terkait penginputan data siswa. Ada beberapa sekolah yang orang tuanya tidak mau mencairkan beasiswa itu, karena orang tuanya bekerja sebagai PNS. Kemudian dari pihak perbankan tidak ada uang yang tersedia atau ada yang tidak mengambil,” tutup Amran. ■ rnm/es

**K**omisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI) memberikan penjelasan secara komprehensif terkait penabagan anggaran Kemendikbud Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 599 miliar di bagian Sekretariat Jendral untuk pembangunan gedung kantor Kemendikbud di Cipete.

“Kami belum dapat membahas sebelum mendapat penjelasan dari Kemendikbud serta mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan RI dan

## Penyaluran KUR di Yogyakarta Diapresiasi

**P**enyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Yogyakarta sangat diapresiasi oleh Komisi XI DPR RI. Dimana, BNI 46 sebagai salah satu Bank penyalur KUR telah menghidupkan usaha kreatif di kota Gudeg tersebut. Untuk itu, Komisi XI DPR RI berkepentingan melihat dari dekat penyaluran KUR tersebut.

Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mengungkapkan, ada dua nasabah baru yang mendapat fasilitas KUR dari BNI Yogyakarta dengan proses yang sangat cepat, cuma satu minggu. Dua nasabah itu adalah usaha tenun bernama Tugu Mas yang mendapat KUR Rp 500 juta dan usaha kulit bernama As Java dengan nilai KUR Rp 300 juta. Komisi XI DPR, kata

Misbakhun ingin mengecek sejauh mana pelaksanaan KUR di Yogyakarta.

“Penyaluran KUR dan pelayanannya sangat bagus. Pengrajin mendapat bimbingan dan bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Ini bukti KUR mendapat manfaat yang luar biasa. Mereka adalah para

Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun.  
Foto: Huseni/HR

nasabah KUR yang baru menerima. Kita berharap mereka akan bertambah kreditnya dan tidak lagi jadi nasabah KUR tapi jadi nasabah yang lebih besar,” ucap politisi Partai Golkar tersebut di Yogyakarta usai mengikuti kunjungan kerja spesifik, Senin (9/9).

Misbakhun menilai, produk dari dua pengrajin yang mendapat KUR ini sangat bagus dan berkualitas. Ini menunjukkan kualitas pengrajin UMKM sangat baik dan kreatif. Dua nasabah pengrajin ini masih menggunakan agunan untuk mendapat akses KUR dari BNI. Ini sebagai komitmen agar kreditnya berjalan dengan baik.

“Yang tidak perlu agunan adalah pengrajin mikro di bawah Rp 25 juta. Agunan itu hanya untuk memperkuat komitmen mereka agar kreditnya berjalan dengan baik. Komitmen BNI untuk menyalurkan KUR perlu kita berikan apresiasi, karena merekalah yang bisa mengangkat harkat hidup usaha kecil,” kilahnya. ■ mh/es

# KUR Mampu Persempit Disparitas dan Kesenjangan Ekonomi

**K**omisi XI DPR RI ingin memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mengucur kepada masyarakat benar-benar produktif. KUR bukan hanya mampu secara ekonomi saja, tetapi juga mengangkat harkat dan martabat dengan menampilkan produk berkualitas serta bisa menyerap tenaga kerja, menurunkan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan serta mempersempit disparitas dan kesenjangan perekonomian di tengah masyarakat.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia saat meninjau sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa Gedangan Bunggul, Provinsi Jawa Timur, Selasa (10/9). Kunjungan tersebut juga didampingi oleh Pimpinan BRI, BNI dan Bank Mandiri Provinsi Jawa Timur.

“Banyak sekali jenis barang produksi lokal anak bangsa yang sudah dinikmati dan diminati oleh konsumen di luar negeri, kami patut berbangga. Tugas legislator hanya mengawal dan memastikan, kalau ingin maju harus bekerja, berusaha dan konsisten dengan produk kita, maka *Insyallah* bukan hanya menghadirkan kesejahteraan, tetapi juga bisa membawa kebanggaan bagi bangsa dan Negara,” kata Indah.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, KUR merupakan jawaban yang paling tepat untuk membantu para pelaku usaha UMKM. Mereka bisa kerja dengan bunga yang sangat murah dan juga dijamin oleh penjaminan kredit daerah (Jamkrida) bagi mereka yang tidak memiliki jaminan, dan yang pasti adalah memberdayakan masyarakat di sekitar.

”

**BANYAK SEKALI JENIS BARANG PRODUKSI LOKAL ANAK BANGSA YANG SUDAH DINIKMATI DAN DIMINATI OLEH KONSUMEN DI LUAR NEGERI...**

“Tujuan akhir dari KUR ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata di seluruh penjuru negeri. Bukan hanya di Jawa saja, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, Papua serta di manapun yang masyarakatnya memiliki kemampuan untuk berproduksi. Yang paling gampang dijual adalah produk produk makanan, minuman dan aksesoris serta kosmetik,” ujar Indah.

Politisi dapil Jawa Timur I ini menerangkan, penyaluran pembiayaan KUR sudah jelas, dimana pembiayaan di atas Rp 25 juta hingga Rp 500 juta perlu ada jaminan untuk memastikan bahwa debitur akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, karena risikonya juga besar. Bank tidak ingin memberikan kredit kemudian berakhir dengan kredit bermasalah atau *Non Profit Loan* (NPL).

“Bank pemerintah memberikan kredit agar mereka berproduksi dan memiliki tanggung jawab, apabila terjadi sesuatu atas usaha tersebut maka jamkrida yang menjamin. Kredit di bawah Rp 25 juta atau untuk para pemula yang baru ingin berusaha, KUR adalah jawaban yang tepat dan tentunya harus mematuhi dan memenuhi persyaratannya. Menurut saya tantangannya adalah begitu berproduksi harus menjaga kualitas,” pungkask Indah. ■ **afri/es**



Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia. Foto: Arief/HR



# Setjen DPR RI Studi Banding dengan Humas Pemkot Surabaya



Bagian Media Cetak dan Media Sosial serta Analis Media Setjen dan BK DPR RI melakukan studi banding dengan Humas Pemerintah Kota Surabaya. Foto: Eko/HR

**B**agian Media Cetak dan Media Sosial serta Analis Media Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan studi banding dengan bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya terkait ide, dan strategi menghadapi gelombang arus informasi agar *branding* lembaga tetap dalam posisi yang layak. Di tengah arus informasi yang masif saat ini, *branding* yang efektif dan

kuat sangat diperlukan oleh sebuah lembaga agar dapat dipercaya oleh publik.

Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Mohammad Djazuli mengungkapkan, siap menyerap informasi dan pengalaman dari Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya keberhasilan Wali Kota Surabaya dalam menjalankan tugas dan menghadapi media ada peran bagian humas yang selalu *men-support*.

“Keberhasilan pimpinan, saya yakin ada Bagian Humas (Hubungan Masyarakat) yang berperan penting. Kami juga seperti itu, ingin belajar,” ujar Djazuli saat berdialog dengan jajaran Humas Pemkot Surabaya, di Komplek Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/9).

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menyampaikan, Humas di Pemkot Surabaya bertugas mengelola informasi, karena sifat informasi yang selalu berkembang. Dia mengatakan kerja kehumasan dituntut dinamis dan tidak kaku.

Dia juga menjelaskan, menjaga hubungan dengan wartawan yang bertugas meliput di lingkungan Balai Kota sebagai mitra kerja menjadi urusan krusial. Bagaimana caranya agar wartawan menjadi mitra kerja sama yang saling menguntungkan. “Menjadikan wartawan sebagai “agensinya” humas, sebagai “pembela” humas secara tidak langsung. Ketika ada informasi tidak berimbang dengan sendirinya ada *counter* isu, sesuai dengan data yang faktual” ungkap Fikser.

Dalam diskusi kedua belah pihak juga menyadari pentingnya membuat agenda *setting* media, tapi harus menghindari kesan pencitraan yang berlebihan. Selain itu, Fikser juga kerap kali menyaring pertanyaan dari para awak media, pertanyaan yang akan dilontarkan dianalisa arah dan dampaknya bagaimana.

“Media adalah partner kita, kami yang punya acara. Biarkan pimpinan (bertindak) natural, tidak boleh *di-setting* menurut media, karena akan terkesan kaku di mata publik, atau saat difoto,” papar Fikser. ■eko/es

# WPFSD 2019 Sukses Hadirkan 'Bali Roadmap'

**G**elaran *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) 2019* resmi diakhiri dengan diadopsinya kesepakatan Bali Roadmap. Kesepakatan yang diinisiasi oleh DPR RI ini, merupakan perwujudan kebutuhan akan komitmen serta *political will* yang kuat dan petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, menilai sukses kesepakatan Bali Roadmap sebagai sebuah *outcome* untuk pencapaian SDGs atau agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, salah satunya dengan slogan *'no one left behind'* atau tidak seorangpun rakyat yang ditinggalkan.

"Alhamdulillah ini sukses yang luar biasa Untuk DPR RI tentunya untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai. Saat ini, kita sudah berhasil memberikan kepada Indonesia, *outcome* dokumen yaitu Bali Roadmap untuk pencapaian SDGs atau agenda 2030," kata Ketua WPFSD ini, sesuai acara WPFSD 2019 di Badung, Bali, pada Kamis (5/9).

Setidaknya, terdapat tiga hal yang menjadi substansi utama dalam dokumen kesepakatan Bali Roadmap, dimulai dari adanya pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar manusia dengan tanpa terkecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Tidak hanya itu, Bali *Roadmap* yang disepakati oleh seluruh peserta

dari 150 delegasi dari 28 negara, untuk mendorong lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat.

Selanjutnya, kesepakatan ini juga mendesak kemitraan dari berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak.

Yang istimewa dari forum parlemen sedunia yang telah memasuki tahun ketiga ini, juga dihadiri oleh Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriela Cuevas Barron. Selain itu, ia menyampaikan apresiasinya terhadap Indonesia terutama pelaksanaan WPFSD sebagai upaya nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Saya sangat bangga dengan apa yang diselenggarakan oleh BKSAP DPR RI bersama semua anggota parlemen dunia. Saya yakin bahwa forum ini bisa menjadi acara untuk menyusun banyak kerja sama, dialog internasional, dan tentu saja lebih banyak hasil yang bisa dibawa kembali ke daerah konstituen kita," ungkap Gabriela.

Parlemen menduduki peran kunci dari implementasi SDGs. Menurut Senator asal Meksiko ini, seorang Anggota Dewan tidak bisa memikirkan bagaimana cara mengubah dunia dalam waktu 11 tahun, jika tidak mempunyai cara pandang yang lebih jelas tentang tanggung jawab seorang legislator dalam pencapaian Agenda 2030



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf.  
Foto: Azka/HR

Pembangunan Berkelanjutan.

"Masih banyak negara yang memiliki hukum yang diskriminatif, sehingga seluruh legislatif di setiap negara harus berkomitmen untuk *'leaving no one behind'*. Berkaitan dengan anggaran, langkah terbaik untuk memerangi semua permasalahan adalah dengan mengesahkan anggaran yang tepat sasaran. Sehingga forum seperti ini dapat terus berlangsung sehingga berbagai negara dapat berbagi *best practice* telah mereka lakukan dalam pencapaian Pembangunan Berkelanjutan," tutupnya. ■ alw/er

# DPR Raih Predikat WTP 2014-2018

**D**PR RI sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 5 tahun berturut-turut, atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik. Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyerahkan secara langsung penghargaan kepada DPR RI, dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan tema “Optimalisasi Laporan Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju”.

Hadir menerima penghargaan tersebut, Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, BAKN, dan BURT Utut Adianto yang mengatakan bahwa dirinya mensyukuri keberhasilan DPR RI dalam meraih penghargaan dari pemerintah tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, DPR RI terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel.

“Kita bersyukur, DPR RI di tengah kritik dan berbagai pendapat yang

seringkali menyudutkan, ternyata di laporan keuangannya telah lima tahun berturut-turut memperoleh penilaian WTP dari BPK. Hari ini kita mendapat penghargaan untuk prestasi tersebut,” kata Utut, saat diwawancara **Parlementaria** usai menerima penghargaan di Gedung Dharmapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Isandar mengatakan meski WTP telah diraih, namun penyempurnaan mekanisme pelaporan terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya Kementerian/Lembaga bisa mulai beradaptasi dengan mekanisme digital dalam pelaporan keuangan dan badan milik negara (BMN), sehingga bisa lebih baik dan lebih cepat lagi ke depannya, sesuai dengan tema besar yang diusung dalam Rakernas tersebut.

“Sebenarnya hingga tahun ini, kita sudah 11 kali mendapat opini WTP. Itu adalah target pencapaian tertinggi dalam mekanisme audit BPK. Tetapi, WTP bukanlah target akhir, walaupun sudah WTP kita tetap

terus memperbaiki mekanisme dalam pelaporan baik secara keuangan, maupun barang milik negara (BMN), sehingga lebih sederhana dan lebih cepat di masa mendatang,” ungkap Indra.

Senada dengan pernyataan Sekjen DPR RI, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers mengatakan bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir. “Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan *feedback* bagi perencanaan penganggaran selanjutnya,” ujarnya.

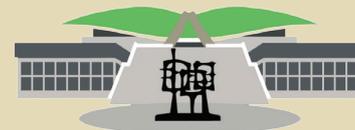
Dengan adanya penghargaan tersebut, seluruh pihak mengharapkan terbangunnya komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat. Terlebih, keuangan negara punya peran dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, hingga mendorong pemerataan yang semakin kuat. ■ atw/sf



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mewakili DPR RI menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Foto: Eka Hindra/HR



# LENSA PARLEMEN



Suasana Komisi III DPR RI menggelar pleno terkait uji kelayakan dan kepatutan untuk menentukan 5 Calon Pimpinan (Capim) KPK melalui voting, dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). Foto: Tari/es



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dipimpin Anggota Komisi VIII DPR RI Adi Putra Darmawan Tahir memantau pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bengkulu, Rabu (11/9). Foto: Puntho/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar didampingi Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari meresmikan Sport Center DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9). Foto: Arief/sf

